

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desa Pao melalui Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk serta Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha

Nasrullah Asri¹, Nur Hilda Ayu², Andi Muh. Ichsan Nur Alam³, Nuryani Ambri⁴, Marwah Amaliah Putri Sam⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Received : 13 Oktober 2025, Revised : 24 Oktober 2025, Published : 6 November 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Marwah Amaliah Putri Sam

E-mail: 10marwahamaliah@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha di Desa Pao, Kabupaten Gowa, melalui pelatihan dan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi produk serta manajemen keuangan usaha. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi belum dimilikinya legalitas usaha dan sertifikasi produk, serta rendahnya kemampuan dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan mitra, penyusunan program, pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi pasca kegiatan. Pelatihan legalitas usaha dan sertifikasi produk dilaksanakan dengan pemberian materi, pemutaran video tutorial, dan sesi tanya jawab, diikuti dengan pendampingan penerbitan NIB dan PIRT. Sementara itu, pelatihan manajemen keuangan usaha mencakup pemberian materi, praktik pencatatan, serta penyediaan buku format keuangan sebagai alat bantu peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas dan pengelolaan keuangan yang baik, serta berhasilnya beberapa pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha resmi.

Kata kunci - pelatihan, legalitas dan sertifikasi, manajemen keuangan, pemberdayaan, UMKM

Abstract

This community service activity aims to enhance the capacity of business actors in Pao Village, Gowa Regency, through training and assistance in business legality and product certification, as well as financial management. The main problems faced by the partners include the absence of business legality and product certification, along with limited skills in financial recording and management. The implementation methods consisted of partner needs analysis, program development, training and mentoring, followed by post-activity monitoring and evaluation. The training on business legality and product certification included the delivery of materials, video tutorials, and question-and-answer sessions, followed by assistance in obtaining NIB and PIRT. Meanwhile, the financial management training covered material presentation, recording practice, and the provision of financial recording books as practical tools for participants. The results of the activity indicated an increase in participants' understanding of the importance of legality and sound financial management, as well as the successful issuance of official business permits for several entrepreneurs.

Keywords – training, legality and certification, financial management, empowerment, MSMEs

How To Cite : Asri, N., Ayu, N. H., Alam, A. M. I. N., Ambri, N., & Sam, M. A. P. (2025). Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desa Pao melalui Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk serta Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1457-1465. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.624>

Copyright ©2025 Nasrullah Asri, Nur Hilda Ayu, Andi Muh. Ichsan Nur Alam, Nuryani Ambri, Marwah Amaliah Putri Sam

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi nasional (Hidayat et al., 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, tercatat sekitar 30,18 juta unit UMKM beroperasi di sektor nonpertanian dan perikanan, serta 29,34 juta unit di sektor pertanian dan perikanan. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Januari 2025 juga menguatkan hal tersebut, dengan menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia (Limanseto, 2025). Namun, meskipun jumlah UMKM terus meningkat, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan manajerial para pelaku usahanya (Munthay & Sembiring, 2024; Satriawan & Mekarsari, 2025).

Desa Pao merupakan salah satu desa wisata yang berlokasi di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan berjarak kurang lebih 15 kilometer dari kawasan wisata Malino Highlands. Selain memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, Desa Pao juga memiliki potensi ekonomi melalui berbagai kegiatan UMKM yang dijalankan oleh masyarakatnya. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pelaku usaha setempat, diketahui bahwa sebagian besar masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama karena belum adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Akibatnya, pelaku usaha kesulitan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh setiap periode. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi produk, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap pembiayaan formal serta mempersempit peluang untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya.

Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap eksistensi suatu usaha yang memberikan kepastian hukum bagi para pelakunya (Indrawati & Rachmawati, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin sesuai tingkat risikonya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kepemilikan legalitas usaha memiliki peran penting karena selain memberikan perlindungan hukum, juga membuka peluang akses terhadap pembiayaan formal serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Aufat et al., 2025). Sementara itu, sertifikasi produk seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) menjadi aspek krusial bagi pelaku UMKM untuk menjamin keamanan dan kelayakan produk yang dikonsumsi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu syarat utama dalam memperluas jangkauan pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra distribusi (Rahmawati et al., 2024).

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek keuangan usaha untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien (Ompusunggu & Irenetia, 2023). Penerapan manajemen keuangan memiliki peran penting bagi pelaku usaha karena menjadi dasar dalam menjaga kestabilan keuangan, mengurangi risiko kerugian, serta mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha (Wahyudiono, 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Hal ini tampak dari lemahnya perencanaan anggaran, ketidakjelasan dalam pengaturan keuangan, kurangnya konsistensi dalam pencatatan transaksi, bahkan sebagian pelaku usaha belum menyusun laporan keuangan sama sekali (Suras et al., 2024). Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh anggapan bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang sulit, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola administrasi keuangan secara tepat (Setiyawati & Hermawan, 2018; Varhana et al., 2025).

Untuk itu, kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) yang diinisiasi oleh Mahasiswa Peneliti Ekolibrum FEB UNM merupakan upaya strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Desa Pao. Melalui pelatihan manajemen keuangan serta edukasi terkait legalitas usaha dan sertifikasi produk, program ini berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara sistematis dan memahami aspek regulasi usaha yang menjadi dasar keberlanjutan bisnis. Selain memberikan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga menekankan pada praktik langsung seperti pencatatan keuangan sederhana, pembuatan izin usaha, dan proses

pengurusan sertifikasi PIRT. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada penguatan fondasi kelembagaan dan profesionalisme pelaku usaha agar lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di era modern.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan para pelaku usaha agar mampu mengelola keuangan usaha secara efektif melalui pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi yang teratur, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dan sertifikasi produk seperti NIB dan PIRT, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum, menjamin keamanan produk, serta memperluas akses pasar. Melalui pendampingan langsung dan edukasi yang diberikan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian, keberlanjutan usaha, serta meningkatkan tata kelola keuangan dan administrasi yang lebih profesional di kalangan pelaku usaha Desa Pao.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan observasi lapangan guna mengidentifikasi kondisi aktual serta kebutuhan mitra sasaran, yakni para pelaku usaha di Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kegiatan observasi tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya (Melati et al., 2024). Terdapat beberapa pelaku usaha dengan variasi produk unggulan yang dihasilkan, antara lain olahan pangan lokal, kerajinan tangan, serta hasil pertanian khas daerah setempat. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi produk, serta masih menghadapi kendala dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan. Legalitas usaha menjadi aspek fundamental sebuah usaha karena berfungsi sebagai identitas hukum, sementara sertifikasi produk berperan sebagai standar kualitas untuk menjamin kepercayaan konsumen (Pandanwangi et al., 2023; Purnawan & Adillah, 2020). Adapun manajemen keuangan memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis melalui penggunaan sumber daya secara efektif (Nurafifah et al., 2025).

Pelaksanaan program dilakukan melalui model *workshop* dengan pendekatan partisipatif, yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Waluyo et al., 2025). Tahap awal diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat Desa Pao untuk memperkenalkan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M), sekaligus menjelaskan tujuan serta manfaat dari pelatihan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan pelatihan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman terkait legalitas usaha dan sertifikasi produk, serta penguatan kemampuan dalam manajemen keuangan usaha. Tahapan pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut.

a. Analisis Permasalahan Mitra

Tahapan awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis permasalahan mitra, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Pao.

b. Penyusunan Program

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim pelaksana menyusun program pelatihan dan pendampingan yang secara spesifik diarahkan untuk memperkuat aspek legalitas usaha dan sertifikasi produk serta manajemen keuangan usaha. Penyusunan program dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tim Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M), pemerintah desa, serta pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian program dengan kondisi mitra sasaran.

c. Pelatihan dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui *workshop* interaktif dengan metode partisipatif, yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam proses belajar (Eldon & Ashari, 2025). Pada pelatihan legalitas usaha dan sertifikasi produk, peserta diberikan materi terkait pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi produk serta prosedur pendaftaran NIB dan PIRT. Sementara itu, pelatihan manajemen keuangan usaha mencakup materi mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi, perhitungan HPP, serta penyusunan laporan keuangan sederhana.

d. *Monitoring* dan Evaluasi

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelatihan serta sejauh mana hasil kegiatan diterapkan oleh para pelaku usaha (Djati,

2025). Evaluasi dilakukan melalui *pre test* dan *post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, serta melalui umpan balik dan observasi terhadap penerapan hasil pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kebutuhan mitra menunjukkan bahwa pelaku usaha di Desa Pao masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berdampak pada keberlangsungan dan pengembangan usaha. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi produk. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam memperluas akses pasar, karena ketiadaan dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin PIRT dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan (Ruswandi et al., 2025). Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi tantangan pada aspek manajerial, terutama dalam hal pencatatan serta pengelolaan keuangan. Kurangnya pemahaman terkait sistem keuangan usaha menyebabkan tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta lemahnya kemampuan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan secara objektif (Jedeot et al., 2025).



Gambar 1. Wawancara dengan Salah Satu Pelaku Usaha

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pelaksana merumuskan strategi intervensi berupa penyelenggaraan dua program pelatihan, yaitu Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk serta Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha. Kedua program ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas administratif dan finansial pelaku usaha. Pelatihan sertifikasi dan legalitas usaha difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perizinan dan langkah-langkah prosedural dalam memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi produk, sedangkan pelatihan manajemen keuangan diarahkan pada penguatan kemampuan peserta dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha yang efektif. Sebagai pendukung keberlanjutan program, tim pelaksana juga menyusun dua modul ajar sebagai luaran kegiatan, yang berfungsi sebagai panduan praktis dalam pelaksanaan pelatihan serupa di masa mendatang oleh masyarakat maupun perangkat desa.

Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk

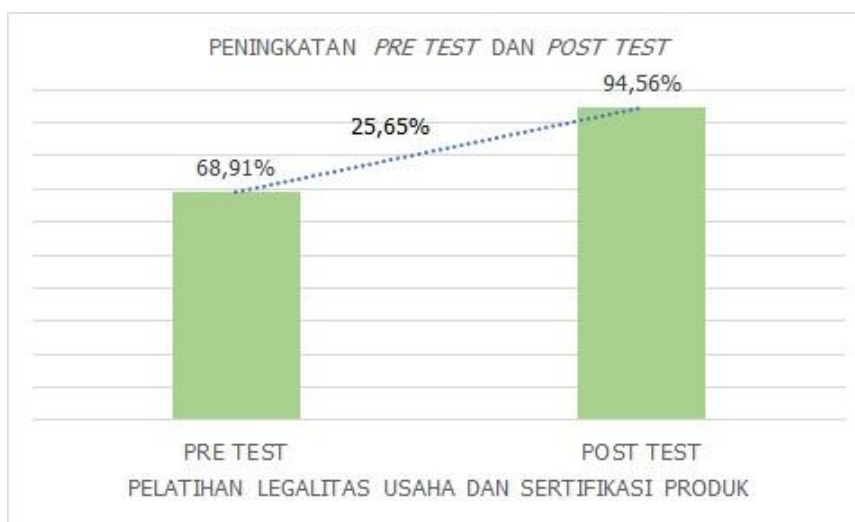
Pelatihan mengenai legalitas usaha dan sertifikasi produk diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya aspek legal dalam menjalankan kegiatan usaha. Materi pelatihan difokuskan pada penjelasan tentang urgensi kepemilikan dokumen legal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), yang berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah sekaligus menjadi faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas serta daya saing produk di pasar (Maulana & Mawardi, 2025). Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai prosedur dan tahapan pendaftaran yang harus dilalui, mulai dari pengisian data pada sistem OSS hingga persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk memperoleh izin. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara interaktif dengan disertai pemutaran video tutorial pendaftaran NIB dan PIRT sebagai panduan visual bagi peserta. Pada sesi akhir, dilakukan

diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengklarifikasi kendala yang dihadapi serta memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.



Gambar 2. Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk

Setelah pelaksanaan pelatihan, tim pelaksana melanjutkan kegiatan dengan melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses penerbitan NIB dan PIRT. Pendampingan ini mencakup bimbingan teknis dalam pengisian formulir, pengunggahan dokumen pada sistem OSS, hingga proses pengajuan dan penerbitan izin. Melalui proses pendampingan lanjutan, beberapa pelaku usaha berhasil memperoleh NIB dan PIRT secara resmi, yang kemudian diserahkan kepada peserta. Berdasarkan hasil evaluasi melalui *pre test* dan *post test*, terjadi peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan, yaitu dari 68,91% pada saat *pre test* menjadi 94,56% pada *post test*, atau mengalami peningkatan sebesar 25,65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi serta prosedur pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk. Selain itu, kegiatan pendampingan pascapelatihan menunjukkan bahwa pelaku usaha telah dapat mengimplementasikan materi secara nyata.



Gambar 3. Peningkatan Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Legalitas dan Sertifikasi

Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha

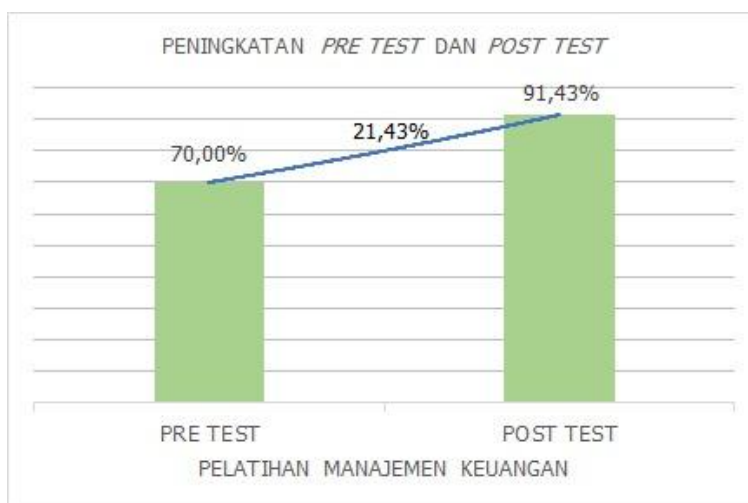
Pelatihan manajemen keuangan usaha dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mencatat keuangan secara sistematis dan terukur. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha sebagai langkah awal dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Syuhada et al., 2025). Selain itu, peserta diberikan

pemahaman mengenai konsep dasar manajemen keuangan usaha, perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), serta teknik pencatatan transaksi keuangan harian dan bulanan. Materi disampaikan secara interaktif dengan mengaitkan contoh nyata dari aktivitas usaha peserta, sehingga memudahkan mereka dalam memahami penerapan konsep keuangan sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing.



Gambar 4. Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha

Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik dan simulasi pencatatan keuangan usaha, di mana peserta secara langsung mempraktikkan cara mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran menggunakan format yang telah disediakan. Untuk mendukung keberlanjutan penerapan hasil pelatihan, setiap pelaku usaha dibekali dengan buku format pencatatan keuangan usaha yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengelola transaksi secara rutin. Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan kendala yang dihadapi serta memperoleh solusi praktis dari tim pelaksana. Evaluasi pelatihan melalui *pre test* dan *post test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dari 70,00% menjadi 91,43%, atau mengalami peningkatan sebesar 21,43%, yang menandakan bahwa pelatihan ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mencatat keuangan secara sistematis.



Gambar 5. Peningkatan Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Manajemen Keuangan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pelatihan serta sejauh mana tujuan pengabdian kepada masyarakat tercapai. *Monitoring* dilakukan dengan kunjungan langsung secara *door to door* ke rumah pelaku usaha untuk memantau perkembangan kegiatan usaha, memberikan pendampingan terkait pengelolaan keuangan dan legalitas, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan hasil pelatihan. Sedangkan

evaluasi dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, wawancara, formulir *feedback*, serta analisis hasil *pre test* dan *post test* dari kedua pelatihan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, diketahui bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme peserta tergolong tinggi, ditunjukkan dengan kehadiran yang konsisten serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan praktik. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap materi pelatihan, baik pada aspek legalitas usaha dan sertifikasi produk maupun manajemen keuangan, yang tercermin dari hasil evaluasi kuantitatif serta umpan balik positif yang diberikan. Selain itu, pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan mendorong peserta untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman serta kendala yang mereka hadapi.



Gambar 6. *Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan*

Secara keseluruhan, hasil *monitoring* dan evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha di Desa Pao. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta diikuti oleh penerapan langsung dalam bentuk pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk serta penerapan sistem pencatatan keuangan sederhana. Keberhasilan ini juga didukung oleh adanya modul ajar yang disusun sebagai bahan pendukung pembelajaran, sehingga masyarakat dapat terus memanfaatkan materi tersebut secara mandiri setelah kegiatan berakhir. Namun demikian, tim pelaksana mengidentifikasi perlunya tindak lanjut berupa pendampingan berkala untuk memastikan konsistensi penerapan materi di lapangan. Dengan demikian, keberlanjutan program dapat terjaga dan manfaat pelatihan dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pelatihan legalitas usaha dan sertifikasi produk serta pelatihan manajemen keuangan usaha ini telah berhasil menjawab tujuan program, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam aspek administratif dan finansial. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur perizinan, serta kemampuan dalam mengelola dan mencatat keuangan secara sistematis. Pelaksanaan pelatihan yang disertai dengan pendampingan langsung dan penyusunan modul ajar turut memperkuat dampak kegiatan, karena memberikan panduan praktis yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam mendorong kemandirian pelaku usaha lokal serta memperkuat fondasi pengelolaan usaha yang legal, transparan, dan berkelanjutan.

Penulis menyarankan agar program serupa dapat dikembangkan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta durasi pendampingan yang lebih panjang untuk memastikan keberlanjutan hasil pelatihan. Pemerintah desa dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memanfaatkan modul ajar yang telah disusun sebagai bahan edukasi rutin dalam pembinaan pelaku usaha. Selain itu, penting untuk menambahkan aspek digitalisasi dalam pelatihan manajemen usaha di masa mendatang, seperti pencatatan keuangan berbasis aplikasi dan promosi digital, agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperluas akses pasar secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa dan Pemerintah Desa Pao atas dukungan, fasilitasi, serta kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku usaha Desa Pao yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi pelatihan, serta kepada para pemateri yang telah memberikan kontribusi ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Penghargaan yang sama diberikan kepada panitia pelaksana, *volunteer*, dan *steering committee* yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dalam mensukseskan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) ini. Tak lupa, ucapan terima kasih yang mendalam ditujukan kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa Peneliti Ekolibrum FEB UNM atas dukungan dan kolaborasi yang diberikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Desa Pao, memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni. (2025). Analisis Pentingnya Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis sebagai Jaminan Keabsahan Usaha. *Journal of Information Systems Management and Digital Business (JISMDB)*, 2(4), 314–325.
- Djati, D. I. (2025). Pemberdayaan Wirausaha Pemula Menggunakan Standard Operating Procedure Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas, di Desa Kragan, Sidoarjo. *Journal of Research Applications in Community Service*, 4(2), 79–86.
- Eldon, M., & Ashari, D. R. W. (2025). Transformasi Kapasitas Pemasaran Digital UMKM Makanan Ringan melalui Workshop Partisipatif di Kawasan Semi-Perkotaan. *JANITA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung*, 5(1), 62–71.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
- Jedeot, A., Santi, F., Trisna June, C. G., & Anggraeni, A. Y. (2025). Integrasi Akuntansi sebagai Pondasi Keuangan dalam Manajemen Kas Usaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 20–27.
- Limanseto, H. (2025). *Siaran Pers: Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses dari: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia#>
- Maulana, F. A., & Mawardi, A. I. (2025). Pendampingan Legalitas Melalui Pendaftaran PIRT Pada UMKM Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*, 6(2), 1934–1942.
- Melati, Misnawati, Haris, T. S., Rahmadani, J., & Mutmaiana. (2024). Analisis Potensi dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10557–10565.
- Munthay, S. F., & Sembiring, M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 22–35.
- Nurafifah, A., Soleha, A., & Misra, I. (2025). Peran Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan UMKM Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis. *Opportunity Research and Community Service Journal*, 3(1), 18–41.
- Ompusunggu, D., & Irenetia, N. (2023). Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 140–147.
- Pandanwangi, K., Putra, A. R. S., Haryadi, F. T., Astuti, A., & Syahlani, S. P. (2023). Does Product Certification Matter? A Review of Mechanism to Influence Customer Loyalty in The Poultry Feed Industry. *Open Agriculture*, 8(1), 1–12.
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Rahmawati, D., Meliana, M., Wahyuni, W. T., Maulidiyah, I., Saqila, E., Eilma, S., Fauziah, N., Nevy, B.,

- Maulidiyah, M., Diana, S. N., Shabira, A. S., Seran, M., & Lovirna, F. (2024). Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Article. *Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(1), 164–170.
- Ruswandi, W., Hamidi, D. Z., Ginanjar, H., Sunarti, U., Anifah, F., Maryam, S., Ribuanasyah, M. J., Nabila, S. S., Wandayanti, R., Fadilah, S. S., & Wijaya, C. S. (2025). Penguatan Usaha Kecil Menengah di Desa Sukamaju melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Upaya Legalitas Usaha. *TRIMAS: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 75–83.
- Satriawan, D. G., & Mekarsari, N. K. A. (2025). Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tabanan yang Tangguh. *Jurnal Manajemen Widta Amerta*, 12(1), 1–12.
- Setiyawati, Y., & Hermawan, S. (2018). Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 161–204.
- Suras, M., Semaun, S., & Darwis. (2024). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). *Moneta: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 28–41.
- Syuhada, P., Putri, A., Safrida, E., Gultom, S. A., & Surianti, M. (2025). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana dan Pelatihan Manajemen Keuangan Dasar untuk UMKM: Meningkatkan Kapasitas Manajerial dan Akuntabilitas. *Jurnal Vokasi*, 9(2), 159–166.
- Varhana, N. V., Marcella, T. C., Amin, S. A., & Yudiantoro, D. (2025). Peran Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan dalam Menunjang Tingkat Literasi Keuangan UMKM. *Neraca Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, 20(7), 1–10.
- Wahyudiono, A. (2024). Transformasi Digital Manajemen Keuangan UMKM Melalui Workshop Penerapan Aplikasi Labamu dan Pencatatan Keuangan Efisien. *Paramacitra Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 156–168.
- Waluyo, Syahputri, A. M., Syaifullah, R., Sabarini, S. S., Liskustyawati, H., & Nugroho, D. (2025). Improving Teachers' Understanding and Skills in Implementing SAI Through a Participatory Workshop Approach. *Insan Cendekia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 249–257.